Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan
Volume. 10 No. 1. Mei 2023, Page: 61-77
e-ISSN :2774-2040; p-ISSN :2443-3519

SKEMA PENGENTASAN KEMISKINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DI KOTA MATARAM

Inka Nusamuda Pratama
[1]Universitas Muhammadiyah Mataram
E-Mail : inka.nusamuda@ummat.ac.id

Abstrak

Kajian dalam penelitian ini ingin mengetahui terkait dengan skema pengentasan kemiskinan ditinjau dari perspektif *collaborative governance* di Kota Mataram. Konsep *collaborative governance* muncul di era paradigma governance. Di era paradigma governance, masyarakat semakin berkembang sehingga pemerintah menghadapi masalah yang lebih kompleks. Pemerintah memiliki keterbatasan untuk mengatasi masalah tersebut seorang diri sehingga perlu berkolaborasi dengan aktor-aktor eksternal. *Collaborative governance* bukanlah suatu tahapan yang linear, melainkan sebuah siklus. Metode yang digunakan dalam studi ini yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data wawancara kepada stakeholder terkait. Hasil dalam penelitian ini Skema pengentasan kemiskinan ditinjau dari perspektif Collaborative Governance di Kota Mataram berjalan dengan baik. Kerjasama kolektif antara Pemerintah dan Swasta mampu menekan angka pengentasan kemiskinan di Kota Mataram. Kolaborasi dibutuhkan untuk terus mendorong lahirnya inovasi-inovasi dibidang pengetahuan, formulasi kebijakan yang ideal dan tepat sasaran, support bantuan dan sumbangan berbentuk logistik, serta mutual understanding dari masyarakat yang mampu memberikan dampak positif dalam menekan pengentasan kemiskinan di Kota Mataram.

Kata Kunci: ***Kemiskinan, Kolaborasi, Pemerintah***

PENDAHULUAN

Menurut data World Bank pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan cukup drastis dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada dua tahun terakhir yang berada pada angka 5,0% sampai dengan 5,2% (IMF, 2021). Saat ini semua Negara sedang mengalami goncangan besar, banyak upaya dilakukan untuk mendapatkan kebijakan terbaik untuk memperbaiki perekonomian ini (Qodriyatun, 2013). Ditambah lagi dengan beban fiskal yang semakin besar akibat wabah Covid-19 yang belum kunjung membaik. Diantara kebijkan Pemerintah untuk merespon hal ini adalah munculnya Perpres No.72 tahun 2020 tentang perubahan postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara Indonesia (Latif et al., 2020).

Salah satu penyebab kemiskinan yang tidak sering dibahas adalah bencana atau wabah penyakit. Wabah virus corona yang lebih dikenal dengan pandemi Covid-19 telah mengguncang Kota Mataram sejak akhir tahun 2019. Pandemi ini menyebar secara luas pada awal Maret 2020, Covid-19 masuk ke Kota Mataram dengan jumlah terinfeksi yang terus meningkat dengan wilayah sebaran yang semakin meluas, sehingga dinyatakan sebagai bencana nonalam (Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2022). Pemberlakuan berbagai kebijakan dalam rangka mengatasi penyebaran atau upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan ekonomi yang mengalami kontraksi bahkan berhenti berproduksi di Kota Mataram. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan pengangguran, penurunan tingkat produktivitas individu maupun perusahaan, serta mendorong munculnya orang miskin baru yang secara agregat meningkatkan jumlah penduduk miskin di Kota Mataram (Suryahadi et al., 2021). Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kota Mataram perlu mengupayakan penanggulangan dan penanganan kemiskinan secara cepat dan tepat, baik yang sifatnya jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang (Suryahadi et al., 2021).

Pandemi Covid-19 membuat jumlah penduduk miskin di Kota Mataram bertambah. Data kemiskinan yang dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram, angka kemiskinan bertambah sekitar 0,18 persen. Angka kemiskinan per September 2021 naik sedikit dari tahun lalu. Perekonomian di Kota Mataram sama seperti daerah lain yang ada di Indonesia masih terpuruk akibat pandemi Covid-19. Meskipun dipenghujung tahun, kondisi perekonomian sedikit menggeliat karena

adanya event *World Superbike* (WSBK) Mandalika, itu belum mampu mencegah bertambahnya kemiskinan yang ada di Kota Mataram (Irwan Suriadi et al., 2021).

Garis kemiskinan Kota Mataram berada di angka Rp 499.959. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Mengacu pada data persentase kemiskinan di Kota Mataram tahun 2020 lalu, angkanya berada di 8,47 persen. Dengan kenaikan 0,18 persen, maka persentase kemiskinan 2021 menjadi 8.65 persen. Jumlah warga miskin sekitar 42 ribu jiwa (mataramkota.bps.go.id).

Kondisi kemiskinan di Kota Mataram masih terlihat dari sulitnya lapangan pekerjaan. Akibatnya, berbagai cara dilakukan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, masyarakat yang semula menjadi buruh bangunan akhirnya kini memilih menjadi penambang pasir. Masyarakat akan melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terlebih dengan lapangan pekerjaan sekarang yang cukup sulit ditengah Covid-19 saat ini (Aditya et al., 2018).

Dalam merespon kemiskinan dari dampak adanya Covid-19 di Kota Mataram, memerlukan dukungan dan kolaborasi dari organisasi–organisasi pemberi bantuan, seperti yang dikemukakan oleh (Aribowo et al., 2018), bahwa Pemerintah tidak mungkin mampu untuk merespon segala bentuk permasalahan serta memulihkan dampak bencana Covid-19 secara sendirian. Upaya respon dan pemulihan bencana non alam tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, namun juga direspon oleh Non Govermental Organizations atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan–perusahaan, lembaga dan institusi swasta, militer, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan media sebagai alat untuk memframing permasalahan yang terjadi (Pratama Inka, 2021).

Konsep *collaborative governance* muncul di era paradigma governance. Di era paradigma governance, masyarakat semakin berkembang sehingga pemerintah menghadapi masalah yang lebih kompleks. Pemerintah memiliki keterbatasan untuk mengatasi masalah tersebut seorang diri sehingga perlu berkolaborasi dengan aktor-aktor eksternal (Ekha et al., 2020).

Collaborative governance merupakan sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang dikembangkan dalam dua dekade terakhir. Strategi tata kelola pemerintahan 30 Universitas Indonesia tersebut membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat keputusan yang berorientasi konsensus. Lebih lanjut, kedua ahli tersebut mendefinisikan *collaborative governance* sebagai: "Sebuah aransemen tata kelola pemerintahan yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor nonpemerintah dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan konsultatif, yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik (Titik, 2018).

Collaborative governance bukanlah suatu tahapan yang linear, melainkan sebuah siklus. (Chiheum & Youngchai, 2018) menyebutkan bahwa ada empat komponen dalam tahapan collaborative governance sebagai berikut:

Gambar 1
Tahap *Collaborative Governance*

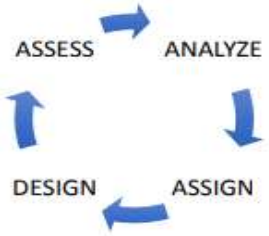

Sumber: (Chiheum & Youngchai, 2018)

1) *Analyze*: Langkah pertama dalam proses collaborative governance adalah menganalisis situasi. Analisis dimulai dengan memahami tujuan yang ingin dicapai pemerintah. Tahap ini dilakukan dengan menganalisis *status quo* yang tengah dihadapi pemerintah. Pemerintah kemudian mencari cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam tahap ini, pemerintah juga perlu menganalisis aktor-aktor mana saja yang perlu dilibatkan dalam upaya pencapaian tujuan.
2) *Assign*: Tahap assign merupakan tahap yang mengatur aktor yang tepat untuk mengerjakan tugas yang tepat (the right player in the right position). Dalam tahap ini, aktor nonpemerintah juga memiliki diskresi untuk menentukan posisi yang diinginkan. Collaborative governance akan berjalan dengan baik apabila para aktor memiliki tugas yang tepat sesuai dengan kapasitasnya.
3) *Design*: Tahap design merupakan tahap yang dilakukan untuk melengkapi tanggung jawab yang sudah diberikan pada tahap assign. Tahap ini mengatur hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta tugas yang harus dikerjakan oleh para

aktor. Tahap ini juga mengatur mekanisme pengawasan, insentif, serta jangka waktu kolaborasi. Di tahap ini sering terjadi negosiasi, terutama ketika ada perbedaan kepentingan antaraktor.

4) *Assess*: Tahap assess merupakan tahap yang mengatur bahwa pelaksanaan *collaborative governance* sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan hal yang penting dilakukan untuk memastikan bahwa collaborative governance berjalan sesuai rencana. Para aktor yang terlibat perlu mengidentifikasi hal-hal yang sudah tercapai dan hal-hal yang tidak sesuai dalam implementasi *collaborative governance.*

Kolaborasi juga merupakan tingkatan tertinggi hubungan antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah sebagaimana yang diungkapkan oleh (Chiheum & Youngchai, 2018). Hubungan antara pemerintah dan aktor nonpemerintah terbagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari tidak ada interaksi sama sekali, hingga hubungan yang sangat dekat dan sinergis. Hubungan tersebut terbagi menjadi lima jenis, yaitu:

Gambar 2
Tingkatan Interaksi Sektor Publik dan Aktor Nonpemerintah

Sumber: (Chiheum & Youngchai, 2018)

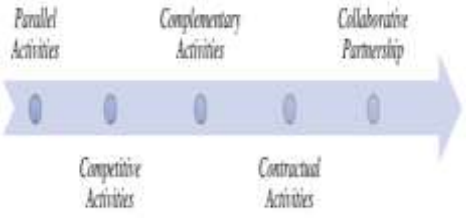

a) *Parallel activities* (aktivitas paralel), merupakan interaksi yang mana sektor publik dan aktor nonpemerintah melaksanakan tugas masing-masing tanpa adanya kontak atau mengenali eksistensi satu sama lain.
b) *Competitive activities* (aktivitas kompetitif), merupakan interaksi yang mana sektor publik dan aktor nonpemerintah melaksanakan tugas di bidang yang sama, memiliki target pasar yang sama, dan berkompetisi satu sama lain.
c) *Complementary activities* (aktivitas komplementer), merupakan interaksi yang mana sektor publik dan aktor nonpemerintah memberi dukungan satu sama lain, namun tanpa adanya remunerasi (pembayaran).
d) *Contractual activities* (aktivitas kontraktual), merupakan interaksi yang mana sektor publik membayar aktor nonpemerintah untuk melakukan pekerjaan tertentu sesuai kontrak yang disepakati.

e) *Collaborative partnership* (kemitraan kolaboratif), merupakan interaksi yang mana sektor publik dan aktor nonpemerintah bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama.

Adapun fokus dari penelitian ini yaitu ingin melihat skema pengentasan kemiskinan ditinjau dari perspektif *collaborative governance* di Kota Mataram. Disamping penelitian ini akan menambah hazanah solusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, juga akan menambah modul terapan dalam pola dan konsep *collaborative governance* yang akan langsung bisa diterapkan didalam pelaksanaan Pemerintah Daerah yang sedang membutuhkan model Kolaborasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengentasan kemiskinan ditinjau dari perspektif *collaborative governance* di Kota Mataram.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti atau dari keterangan pihak Pemerintah Kota Mataram dan Swasta yaitu Lembaga Amil Zakat Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI). Selain itu juga didukung data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari dokumen kolaborasi Pemerintah dengan pihak lain di Kota Mataram, publikasi-publikasi, atau literatur berupa buku-buku, media cetak maupun online terkait dengan pengentasan kemiskinan ditinjau dari perspektif *collaborative governance* di Kota Mataram. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas observasi (observation), wawancara (interview), dan dokumentasi (documentation). Sedangkan teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan modelinteraktif yang terdiri dari tiga hal utama, yaitu; (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengukur kemiskinan pada suatau Daerah, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan menggunakan pendekatan ini, kemiskinan dapat dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk (Badan Pusat Statistik, 2019). Metode yang digunakan yaitu

menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2019).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh sekitar 52 jenis komoditi (padi-padian, umbiumbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Sementara Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan (Badan Pusat Statistik, 2019).

Garis kemiskinan dipergunakan sebagai batas menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) tersusun atas Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Pada Tabel 3 dibawah ini memperlihatkan besarnya Garis Kemiskinan di Kota Mataram yang diakibatkan dari adanya Covid-19 selama bulan Maret tahun 2019 dan bulan Maret tahun 2021 (Suryati & Salkiah, 2019).

Tabel 1
Situasi Garis Kemiskinan Saat Covid-19 Pada Bulan Maret 2019-Maret 2021 Di Kota Mataram

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Perbulan)
2019	480.304
2020	499.959
2021	524.762
Perubahan Maret 2020-Maret 2021 (%)	4,96

Sumber: Diolah dari data Susenas, 2021

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa Garis Kemiskinan yang ada di Kota Mataram selama tiga tahun terakhir terus mengalami tren kenaikan. Pada bulan Maret tahun 2019, Garis Kemiskinan di Kota Mataram sebesar Rp.480.304 per kapita per bulan, kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp.499.959 per kapita per bulan pada bulan Maret tahun 2020. Kemudian, pada bulan Maret tahun 2021 menjadi Rp.524.762 per kapita per bulan. Dibandingkan bulan Maret tahun

2020, perubahan Garis Kemiskinan di Kota Mataram sebesar 4,96 persen. Ini menggambarkan bahwa kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir yang ada di Kota Mataram mengalami peningkatan. Covid-19 adalah pemicu dari melonjak sangat tajamnya kemiskinan di Kota Mataram (Dikutip dari Data Susenas, 2021).

Tabel 2

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Maret 2020 - Maret 2021

	Maret 2020		Maret 2021	
Kabupaten/Kota	**Jumlah (ribu)**	**Persentase**	**Jumlah (ribu)**	**Persentase**
Lombok Barat	100.25	14.28	105.24	14.47
Lombok Tengah	128.10	13.44	131.94	13.44
Lombok Timur	183.84	15.24	190.84	15.38
Sumbawa	62.88	13.65	66.00	13.91
Dompu	30.97	12.16	33.26	12.60
Bima	71.32	14.49	17.49	14.88
Sumbawa Barat	20.20	13.34	21.51	13.54
Lombok Utara	59.86	26.99	61.70	27.04
Kota Mataram	41.80	8.47	44.45	8.65
Kota Bima	14.66	8.35	16.22	8.88
Nusa Tenggara Barat	713.89	13.97	746.66	14.14

Sumber: Diolah dari data Susenas, 2021

Tabel 3

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2019-Maret 2021 Di Kota Mataram

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
Maret 2019	43.19	8.92
Maret 2020	41.80	8.47
Maret 2021	44.45	8.65

Sumber: Diolah dari data Susenas, 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Jumlah penduduk miskin di Kota Mataram pada bulan Maret tahun 2021 sekitar 44,45 ribu orang. Dibandingkan

bulan Maret tahun 2020, jumlahnya bertambah sekitar 2,65 ribu orang. Pada bulan Maret tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kota Mataram sekitar 41,8 ribu orang. Adapun persentase penduduk miskin pada periode bulan Maret tahun 2020–bulan Maret tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen poin dari 8.47 persen menjadi 8,65 persen. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada bulan Maret tahun 2021 saat itu disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Kota Mataram (Dikutip dari Data Susenas, 2021).

Sejak tahun 2010 hingga tahun 2020 perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Mataram cenderung mengalami penurunan. Namun, apabila diamati setiap periodenya, penurunan penduduk miskin bersifat fluktuatif dan poin penurunannya berfariasi. Penurunan angka kemiskinan pada periode 2011-2012 merupakan yang tertinggi. Tren penurunan kemiskinan terhenti pada 2021 karena pandemi Covid-19 menyebabkan banyak kegiatan perekonomian tidak bisa berjalan seperti biasa, sehingga pendapatan masyarakatpun tertekan(Abdurrahman et al. , 2019).

Tabel 4

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Mataram

Tahun 2010-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Perubahan Penduduk Miskin
2010	58.27	14.44	-
2011	53.74	13.18	-1.26 Poin
2012	50.48	11.88	-1.30 Poin
2013	46.67	10.75	-1.13 Poin
2014	46.67	10.53	-022 Poin
2015	46.76	10.45	-0.08 Poin
2016	44.81	9.80	-0.65 Poin
2017	44.53	9.55	-0.25 poin
2018	42.60	8.96	-0.59 Poin
2019	43.19	8.92	-0.04 Poin
2020	41.80	8.47	-0.45 Poin
2021	44.45	8.65	0.18 Poin

Sumber: Diolah dari data Susenas, 2021

Data diatas dapat dijelaskan bahwa penduduk miskin di Kota Mataram dari rentan tahun 2010-2021 mengalami fluktuatif, ini dapat dlihat pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Kota Mataram

berada diangka 58.27 ribu orang, sementara pada tahun 2011 terjadi penurunan menjadi 53.74 ribu orang, dari tahun 2012 sampai tahun 2018 angka kemiskinan konsisten menurun (Dikutip dari Data Susenas, 2021). Namun pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kota Mataram terjadi peningkatan diangka 43.19 ribu orang, dan terus terjadi kenaikan di tahun 2021 diangka 44.45 ribu orang. Terjadinya peningkatan ini dikarenakan adanya situasi Covid-19, tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan yang ditinggalkan Covid-19 merusak segala sektor termasuk ekonomi yang berdampak pada ti ngginya angka kemiskinan di Kota Matara m (Pratomo & Afkar, 2020).

Pemerintah Kota Mataram telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penaggulangan kemiskinan ditengah adanya Covid-19, peningkatan nilai tambah dan penurunan angka pengangguran dengan indikator Persentase Penduduk Miskin (*Head Count Index*) dan pertumbuhan ekonomi (Prihatin & Pratama, 2021). Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif serta untuk mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Mataram telah merumuskan empat strategi utama yang penulis kutip dari website Pemerintah Kota Mataram tahun 2019 yaitu:

1) Memperbaiki program perlindungan sosial;
2) Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;
3) Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin;
4) Menciptakan pembangunan yang inklusif.

Tabel 5

Keberhasilan yang ditargetkan untuk menggambarkan capaian dari sasaran strategis di Kota Mataram

NO	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%
1	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.17	1.58	1.55	101.90
2	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.22	0.37	0.45	78.38

3	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	10.88	9.50	9.35	101.58
4	Indeks Komposit Ketahanan Pangan	4	3-4	4	100

Sumber: Diolah dari data PemKot Mataram, 2019

Indikator sasaran strategis yang ditetapkan dan menjadi acuan dalam pencapaian tujuan sudah menunjukan target yang baik seperti upaya menurunkan Presentase Keluarga Pra Sejahtera yang di tahun 2018 mengalami perlambatan kinerja yaitu sebesar 10,88 persen, kini di tahun 2019 menunjukan kinerja sangat tinggi dibandingkan targetnya, dengan persentase capaian kinerja sebesar 101,58 persen. Kemudian capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) berkinerja sebesar 101,90 persen melampaui target Tahun 2019. Disisi lain Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang tahun 2018 berkinerja 147,62 persen terhadap target hanya tercapai 78,38 persen di tahun 2019. Yang konsisten yaitu capaian terhadap indeks komposit ketahanan pangan sesuai dengan target pengendalian pada rentang 3 sampai 4 poin dan tercapai sebesar 4 poin di tahun 2019 (Website Pemerintah Kota Mataram, 2019).

Perubahan kebijakan anggaran karena adanya pandemi Covid-19 menjadikan Pemerintah Kota Mataram harus melakukan berbagai penyesuaian, terutama dari sisi anggaran yang mesti terkoreksi dengan kebijakan anggaran pemerintah pusat ke daerah (Herwanti et al., 2020). Adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19 ini tentu saja berpengaruh pada alokasi anggaran pembangunan yang sudah ditetapkan. Dari aspek penerimaan pendapatan asli daerah juga berkurang. Karena itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, Pemerintah Kota Mataram harus mengatasinya dengan bekerja lebih optimal, berinovasi, melakukan kolaborasi dengan tetap mengedepankan akuntabilitas untuk mencari sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah untuk melanjutkan pembangunan (Rahmasari et al., 2019).

Dalam upaya pengentasan kemiskinan saat ini pemerintah Kota Mataram memerlukan formulasi kebijakan strategis untuk meningkatkan belanja yang langsung berhubungan dengan penurunan kemiskinan di Kota Mataram. Peningkatan belanja tersebut juga harus diikuti dengan pemanfaatan anggaran yang lebih memberikan dampak yang lebih baik (tidak terkonsentrasi untuk belanja operasionalnya). Secara umum belanja menurut fungsi menjalankan fungsi distributif oleh karenanya pengalokasiannya

agar mengikuti prinsip anggaran berbasis kinerja dengan menerapkan akuntabilitas sehingga memiliki dampak maksimal dalam pembangunan manusia (Fadilla, 2018).

Meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada masa pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Mataram. Selama pandemi Covid-19, produktivitas tenaga kerja mengalami penurunan, pelaku usaha terpaksa merumahkan karyawan sehingga pengangguran bertambah, akibatnya produktivitas tenaga kerja menurun dibandingkan tahun sebelum terjadinya pandemi. Lesunya perekonomian tercermin dari turunnya produktivitas tenaga kerja pada 2021 menjadi Rp36,21 juta per penduduk bekerja (Awwalunnisa, 2021). Produktivitas tenaga kerja dihitung berdasarkan nilai tambah atas dasar harga konstan terhadap jumlah penduduk bekerja. Di semua sektor produktivitas menurun, dan penurunan produktivitas tertinggi dialami sektor Manufactur. Tantangan terbesar adalah pada sektor Pertanian. Secara umum pertanian tidak terdampak secara langsung oleh pandemi Covid-19, namun ternyata produktivitasnya tetap jauh lebih rendah dari tahun 2019. Pada lapangan kerja pertanian sebagian besar penduduk bekerja, meningkatkan produktivitas pekerja pada sektor ini akan memberi dampak yang sangat signifikan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan (Sayuti, 2020).

Pemerintah Kota Mataram dari sisi inflasi perlu memantau sebagai langkah menjaga stabilitas harga, sebab lonjakan harga akan menimbulkan keresahan di masyarakat saat Covid-19. Para ekonom menekankan bahwa inflasi merupakan proses, sehingga diperlukan suatu mekanisme untuk menekan inflasi agar dapat memberikan imbas yang positif terhadap perekonomian (Fatimah et al., 2021).

Gambar 3

Perkembangan Inflasi di Nusa Tenggara Barat

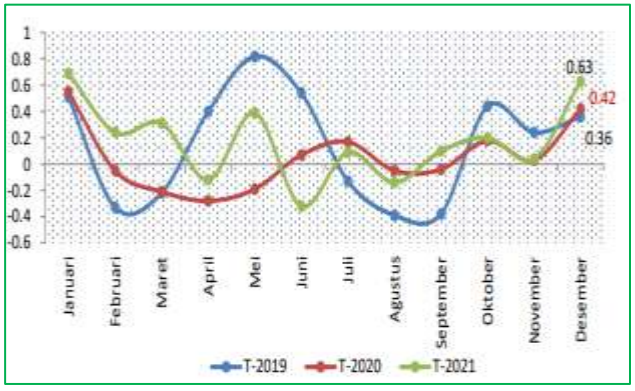

Sumber: Diolah dari ntb.go.id, 2021

Inflasi gabungan Kota Mataram dan Kota Bima Desember 2021 mencapai 0,63 persen. Hal ini terjadi adanya pergerakan IHK dari 105,31 di November 2021 menjadi 105,97 di Desember 2021 (tertinggi dalam 3 tahun terakhir periode yang sama). Angka inflasi ini lebih besar dari inflasi nasional (0,57 persen) sementara untuk Kota pembentuknya, inflasi Kota Mataram sebesar 0,66 persen dan Kota Bima 0,57 persen. Inflasi ini disebabkan adanya kenaikan Indeks Makan Minum, tembakau (1,38 persen), Transportasi 1,11 persen sebagaimana grafik berikut. Sementara Kesehatan dan Infokom dan jasa keuangan mengalami deflasi 0,18 dan 0,01 persen (ntb.go.id, 2021).

Penurunan angka kemiskinan merupakan isu penting dan politis di semua daerah. Seluruh Pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kota Mataram sangat fokus dan berkomitmen dengan isu kemiskinan ini. Isu ini menjadi semakin penting khususnya di era pandemi covid-19 yang menyerang sejak akhir tahun 2020 lalu. Berbagai program ditata dan didesain ulang guna menghadapi gejolak pandemi yang menurunkan aktivitas ekonomi yang ujung-ujungnya berdampak pada program penurunan kemiskinan yang telah direncanakan sebelumnya (Arif et al., 2020).

Dalam penanggulangan kemiskinan yang terjadi akibat adanya Covid-19 di Kota Mataram, pihak Swasta yaitu Lembaga Amil Zakat Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) ikut berkonstribusi dalam melakukan penanggulangan kemiskinan. Adanya aktivitas yang dilakukan LAZ DASI dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat mampu memberikan gambaran bahwa zakat merupakan keuangan Islam yang memiliki potensi yang sangat besar terutam dalam upaya mengurangi penduduk dari himpitan kemiskinan (Herwanti et al., 2020).

Dalam konteks fungsinya, zakat memiliki 3 fungsi yang sangat penting terutama dalam pembiayaan pembangunan antara lain sebagai berikut (Herwanti et al., 2020):

1. *Buffer* (penyangga) APBN, di mana zakat dapat digunakan untuk menanggulangi beban defisit APBN berkenaan dengan anggaran pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan
2. Jaring pengaman sosial dan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan pilar utama dalam menjamin upaya pemenuhan kebutuhan dasar mustahik dan instrumen untuk menciptakan pemeraraan dan keadilan ekonomi
3. Pilar pengembangan *production*

base perekonomian negara; sebagai instrumen untuk mengembangkan basis produksi dalam perekonomian masyarakat.

Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh LAZ DASI di Kota Mataram mengalami perubahan dari tahun ke tahunnya. Berfluktuatifnya dana zakat yang disalurkan juga bergantung pada banyaknya dana yang zakat yang diterima dari paraa wajib zakat (Muzakki) serta jumlah ashnaf yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang menerimanya. Jumlah dana yang disalurkan oleh DASI NTB dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6

Total Penyaluran Dana Zakat Yang Dilaksanakan Oleh DASI Tahun 2017-2020 Di Kota Mataram

No	Tahun	Jumlah Penyaluran Dana Zakat (Rp)	Perubahan (Rp)
1	2017	423.562.784	357.632.843
2	2018	298.453.452	156.671.513
3	2019	531.346.873	253.553.387
4	2020	753.363.109	767.857.743

Sumber: DASI NTB 2020, diolah

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa pata tahun 2020 mngalami kenaikan penyaluran dana, sedangkan pada tahun 2018 adalah tahun dimana Dana yang disaluran mengalami penrunan. Peningkatan jumlah penyaluran dan pada tahun 2020 diakibatkan oleh kepercayaan muzaki kepada LAZ DASI untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat terutama di kota Mataram. Transparansi anggaran yang dilakukan oleh LAZ DASI menjadi faktor yang sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat luas. Hasil wawancara yang dilakukan ,emgatakan bahwa apa yang dilakukan tersebut masih jauh dari harapan meskipun amanah ini semakin besar juga diterma setiap tahunnya (Herwanti et al., 2020).

Dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan yang ada di Kota Mataram akibat Covid-19 sangat dirasakan secara signifikan dan berjalan secara otomatis (*built-in*) dimana zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan saja,

dimana fakir dan miskin ditempatkan pada urutan pertama dan kedua. Secara teoritis sangat efektif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan karena secara inheren bersifat *pro poor* dan sejalan dengan konsep *poverty targetting framework* yang saat ini menjadi acuan dalam arus utama kebijakan pengentasan kemiskinan kontemporer (Herwanti et al., 2020).

PENUTUP

Skema pengentasan kemiskinan ditinjau dari perspektif *Collaborative Governance* di Kota Mataram berjalan dengan baik. Kerjasama kolektif antara Pemerintah dan Swasta mampu menekan angka pengentasan kemiskinan di Kota Mataram. Kolaborasi dibutuhkan untuk terus mendorong lahirnya inovasi-inovasi dibidang pengetahuan, formulasi kebijakan yang ideal dan tepat sasaran, support bantuan dan sumbangan berbentuk logistik, serta *mutual understanding* dari masyarakat yang mampu memberikan dampak positif dalam menekan pengentasan kemiskinan di Kota Mataram.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, A., Rachman, M. T., & Puspita Ayu, D. (2019). Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Pelaksanaan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mataram. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, *7*(2). https://doi.org/10.31764/jiap.v7i2.1272

Aditya, R., Tamba, W., & Arief Rizka, M. (2018). Evaluasi Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mengatasi Kemiskinan di Kota Mataram. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, *4*(2). https://doi.org/10.33394/jk.v4i2.1129

Aribowo, H., Wirapraja, A., & Putra, Y. D. (2018). IMPLEMENTASI KOLABORASI MODEL PENTAHELIX DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN POTENSI PARIWISATA DI JAWA TIMUR SERTA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DOMESTIK. *Jurnal Mebis (Manajemen Dan Bisnis)*, *3*(1). https://doi.org/10.33005/mebis.v3i1.21

Arif, S., Isdijoso, W., Fatah, A. R., & Tamyis, A. R. (2020). Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019-2020. In *The SMERU Research Institute*.

Awwalunnisa, N. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *IQTISHADUNA*, *12*(1). https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v12i1.3283

Badan Pusat Statistik. (2019). Kemiskinan dan Ketimpangan. *Badan Pusat Statistik - Kemiskinan Dan Ketimpangan*, *05*.

Chiheum, H., & Youngchai, Y. (2018). "A Study on Colaborative Governance among Local Governments: Focused on U.S. MPO and Korea Living Sphere Council." *The Journal of Convergence Society and Public Policy*, *12*(1). https://doi.org/10.37582/cspp.2018.12.1.28

Ekha, R., Rika, T., Febri, P., & Audina, N. (2020). Collaborative Governance dalam Penanganan Penyebaran Kasus Corona Virus Disease-19 di Kota

Padang COLABORATIVE GOVERNANCE IN HANDLING THE SPREAD OF CORONA VIRUS DISEASE-19 CASE IN PADANG CITY. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, 4.0*.

Fadilla, A. (2018). ANALISIS KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *4*(2). https://doi.org/10.34308/eqien.v4i2.46

Fatimah, S., Hasbullah, Y., & Yasin, M. (2021). PELATIHAN TEKNIK PERHITUNGAN UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) PADA ANGGOTA TRIPARTIT KOTA MATARAM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015. *Jurnal Abdimas Independen*, *1*(1). https://doi.org/10.29303/independen.v1i1.1

Herwanti, T., Irwan, M., & Maryam, S. (2020). PERANAN ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA MATARAM. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *2*(1). https://doi.org/10.29303/e-jep.v2i1.22

Irwan Suriadi, Hailudin, & Siti Sriningsih. (2021). Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengurai Kemiskinan Di Kota Mataram. *Journal of Economics and Business*, *7*(1). https://doi.org/10.29303/ekonobis.v7i1.70

Latif, V. N., Isrofah, & Priharwanti, A. (2020). Penanganan Covid-19 dalam Perspektif Pentahelix. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, *19*(2).

Pratama Inka, N. H. A. Z. I. (2021). Manajemen bencana non alam COVID-19 dilihat dari kepemimpinan quadruple helix di Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, *7*(2).

Pratomo, A. S., & Afkar, S. Z. (2020). INDEKS DIMENSI MAKRO BAZNAS KOTA MATARAM BERDASARKAN INDEKS ZAKAT NASIONAL. *Kodifikasia*, *14*(1). https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i1.1937

Prihatin, H. T., & Pratama, I. N. (2021). Analisis Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Lombak Barat Nusa Tenggara Barat. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, *1*(2). https://doi.org/10.31764/jgop.v1i2.3962

Qodriyatun, S. N. (2013). Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi: Studi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Model Desa Konservasi. In *P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika*.

Rahmasari, A., Sunani, E. H., Jannah, M., Fathulaili, F., Kurnia, L., & Satria, A. (2019). ARDL Method: Forecasting Data Kemiskinan di NTB. *JTAM | Jurnal Teori Dan Aplikasi Matematika*, *3*(1). https://doi.org/10.31764/jtam.v3i1.767

Sayuti, R. H. (2020). ANALISIS KINERJA SEKTOR PERTANIAN DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI NUSA TENGGARA BARAT PADA PERIODE 2008-2018. *AGROTEKSOS: Agronomi Teknologi Dan Sosial Ekonomi Pertanian*, *30*(1). https://doi.org/10.29303/agroteksos.v30i1.589

Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Yumna, A. (2021). The Impact of Covid-19 and Social Protection Programs on Poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *57*(3). https://doi.org/10.1080/00074918.2021.2005519

Suryati, D., & Salkiah, B. (2019). ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

KERAKYATAN PADA UMKM DI KOTA MATARAM. *MEDIA BINA ILMIAH*, *13*(12). https://doi.org/10.33758/mbi.v13i12.266

Titik, D. (2018). Collaborative Governance as a Management Innovation in Local Decentralization. *E3S Web of Conferences*, *73*. https://doi.org/10.1051/e3sconf/201873090 12